



PERMASALAHAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN 2017

Faridah Alawiyah*)

Abstrak

Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Pendahuluan

Setiap tahun, pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa yang diselenggarakan pada akhir tahun pelajaran selalu mengalami perubahan. Pada tahun pelajaran 2016/2017, ada hal yang berbeda dalam pelaksanaan evaluasi akhir belajar siswa. Selain dilaksanakannya UN, juga terdapat Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Jika tahun pelajaran 2014/2015 UN menentukan kelulusan siswa, maka sejak tahun pelajaran 2015/2016, UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan. USBN

yang menjadi penentu kelulusan siswa. Demikian juga terkait soal ujian. Apabila soal-soal UN dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka soal-soal USBN dibuat oleh guru-guru sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh BSNP dan Kemendikbud. Perubahan lain

*) Peneliti Muda Studi Pendidikan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: faridahalawiyah@gmail.com



adalah bentuk soal ujian. Seluruh soal-soal UN merupakan pilihan berganda, sedangkan soal USBN terdiri dari pilihan ganda dan uraian.

Jumlah peserta UN khususnya UN berbasis komputer (UNBK) juga mengalami peningkatan drastis tahun ini. Berdasarkan data dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, UNBK diikuti oleh 3,8 juta peserta didik yang tersebar di 28.380 sekolah. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peserta UNBK pada tahun 2015 yang hanya mencapai 500 sekolah dan tahun 2016 dengan 4.400 sekolah. Peserta didik yang mengikuti UNBK terbanyak pada level pendidikan SMK yang mencapai 90% sekolah, disusul SMA/MA sebesar 61% sekolah dan SMP/MTs sebesar 27% sekolah. Sementara itu provinsi yang menerapkan UNBK terbanyak adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 100% sekolah, DKI Jakarta 97% sekolah, Kepulauan Bangka Belitung 66% sekolah, Jawa Tengah 48% sekolah, dan Jawa Timur dengan 44% sekolah. Tingginya peserta didik yang mengikuti UNBK karena adanya kebijakan bagi sekolah yang belum memiliki perangkat komputer memadai, dapat menggunakan komputer di sekolah lain dengan jadwal UNBK yang berbeda.

Pelaksanaan evaluasi akhir pembelajaran ini merupakan penjabaran dari bentuk evaluasi pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional seperti yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, perubahan kebijakan setiap tahun menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, tulisan ini ingin memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa didik selama pelaksanaan UN dan USBN tahun 2017 dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Kebijakan UN dan USBN Tahun 2017

Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengambil kebijakan dalam rangka evaluasi akhir pembelajaran siswa dengan tetap dilaksanakannya UN. Namun demikian, untuk meningkatkan mutu hasil evaluasi akhir siswa, ujian sekolah ditingkatkan mutunya menjadi USBN, khusus pada beberapa mata pelajaran. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer baik untuk UN maupun USBN.

Pelaksanaan USBN tahun 2017 dilakukan lebih awal yakni tanggal 20-23 Maret 2017 untuk SMA/MA dan SMK serta tanggal 17-19 April 2017 untuk SMP/MTs. Jika ada peserta didik yang mengikuti susulan maka ujian akan dilaksanakan pada 27-31 Maret 2017 untuk SMA/MA dan SMK, serta tanggal 25-27 April untuk SMP/MTs. Sementara itu, pelaksanaan UN dijadwalkan tanggal 3-6 April 2017 untuk SMK, tanggal 10-13 April 2017 untuk SMA/MA, dan UN untuk SMP/MTs akan dilaksanakan dalam dua gelombang yakni gelombang pertama tanggal 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017 serta gelombang kedua tanggal 8, 9, 10, 16 Mei 2017.

Pada tingkat SMP/MTs, mata pelajaran yang diujikan pada UN sebanyak empat mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Sementara itu mata pelajaran yang diujikan pada USBN sebanyak tiga pelajaran, yakni pendidikan agama, PPKN, dan IPS. Pada tingkat SMA/MA, jumlah mata pelajaran yang diujikan pada UN sebanyak empat mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. Sementara pada USBN terdapat enam mata pelajaran, yakni pendidikan agama, PPKN, sejarah, dan tiga mata pelajaran sesuai program studi siswa. Terakhir pada tingkat SMK, jumlah mata pelajaran yang diujikan pada UN sebanyak empat mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Sementara pada USBN diujikan tiga mata pelajaran, yakni pendidikan agama, PPKN, dan keterampilan komputer.

Permasalahan Pelaksanaan UN

Dalam pelaksanaan UN tahun ini ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemantauan tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI), ditemukan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan UN kepada pihak sekolah tanpa ada pengawasan yang ketat sehingga pendistribusian naskah ujian oleh pemerintah daerah dilakukan tanpa pengawasan. *Kedua*, beberapa sekolah tidak memiliki pakta integritas pengawas untuk menjamin kerahasiaan pelaksanaan ujian. Tim ORI menemukan pengawas yang menciptakan suasana ujian yang tidak kondusif dengan keluar masuk ruangan dan membawa alat

komunikasi elektronik ke ruangan pengujian. *Ketiga*, kebocoran soal ujian, di mana terdapat oknum guru yang melakukan pungutan kepada peserta ujian sebesar Rp25.000 untuk memperoleh kunci jawaban.

Pelaksanaan UNBK juga tidak terhindar dari sejumlah permasalahan. Laporan yang diterima oleh posko pengaduan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan UNBK, antara lain: *pertama*, banyaknya soal uji kejuruan yang tidak muncul pada aplikasi UN. Bahkan pada mata pelajaran agribisnis tanaman perkebunan dan mata pelajaran kesehatan ternak di Bima dan Mataram, soal ujian tidak muncul sama sekali pada aplikasi UN. *Kedua*, adanya pemadaman listrik sehingga mengganggu jalannya pelaksanaan UNBK. Beberapa sekolah bahkan terpaksa menggunakan genset agar pelaksanaan UNBK tidak tertunda. *Ketiga*, jaringan ke *server* yang bermasalah. *Keempat*, permasalahan *login* ke aplikasi UN. Beberapa siswa tidak keluar soal ujiannya sehingga harus *re-login*. Hasilnya, ada siswa yang berhasil *login*, namun ada juga siswa yang tidak dapat *login* kembali sehingga harus mengikuti UNBK ulang pada tanggal 17-18 April 2017.

Selain kendala teknis, juga terdapat beberapa kendala nonteknis, yaitu: *pertama*, kepala sekolah terpaksa berhutang karena tidak memiliki biaya penyelenggaraan UNBK yang disebabkan dana BOS yang belum cair. *Kedua*, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana laboratorium komputer yang memadai, bahkan sejumlah sekolah terpaksa meminjam laptop kepada murid dan guru. *Ketiga*, faktor keamanan sekolah yang lemah di mana salah satu SMKN di Kabupaten Tangerang kehilangan 20 unit laptop karena pencurian. *Keempat*, penyiapan proktor yang tidak optimal di mana proktor harus belajar sendiri dengan menggunakan fasilitas pribadi.

Permasalahan Pelaksanaan USBN

Sama halnya dengan pelaksanaan UN, pelaksanaan USBN juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Berdasarkan pemantauan tim ORI pada pelaksanaan USBN di Jabodetabek, ditemukan beberapa maladministrasi. Banyak sekolah yang menjalankan USBN tidak berdasarkan Prosedural Operasional Standar (POS)

USBN tahun pelajaran 2016/2017. Pada dasarnya pelaksanaan USBN berfungsi untuk membentuk standardisasi mutu pendidikan, namun dengan skema USBN 100% menjadi tanggung jawab guru dan daerah, maka hal ini menjadi tidak relevan.

Pelanggaran POS terjadi pada saat MGMP melakukan pengiriman soal tanpa melibatkan kepolisian. MGMP juga melakukan pengiriman keping cakram digital (CD) soal terlalu dini, yakni H-5 sebelum pelaksanaan USBN. Hal ini memberikan kesempatan bagi sekolah dan guru untuk berbuat kecurangan. Tim ORI mendapat pengakuan bahwa terdapat oknum guru yang mengerjakan soal tersebut dan kemudian menjualnya kepada siswa seharga Rp25.000 per siswa. Temuan lain adalah pengawas ujian yang tidak menggunakan sistem silang sehingga independensi pengawas diragukan. Tim ORI juga menyoroti terkait tidak adanya uji kompetensi khusus dalam perekrutan anggota MGMP dalam perumusan dan penggabungan soal ujian.

Secara khusus terkait adanya kecurangan pada pelaksanaan USBN, terjadi kasus yang sangat memprihatinkan. Seorang siswi kelas XII SMK Negeri 3 Padang Sidempuan melakukan upaya bunuh diri setelah diduga mendapat intimidasi oknum guru. Intimidasi dilakukan karena siswi tersebut bersama kedua rekannya mengunggah terjadinya kebocoran jawaban USBN yang diberikan oknum guru di media sosial. Adanya kasus ini memunculkan kritik yang disampaikan oleh Ketua FSGI bahwa USBN yang saat ini menjadi faktor penentu kelulusan siswa, memiliki potensi lebih tinggi terjadinya kebocoran soal ujian. FSGI membandingkan dengan UN yang dijaga polisi sangat ketat masih terjadi kebocoran, apalagi USBN yang tanpa penjagaan sama sekali. FSGI menilai pelaksanaan USBN perlu dievaluasi dan menyoroti kembali pentingnya peran sekolah dalam menentukan kelulusan.

Upaya Perbaikan Dalam Pelaksanaan UN dan USBK

Berbagai permasalahan yang dihadapi UN dan USBK tahun ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Adanya perubahan kebijakan UN dari tahun ke tahun menjadikan siswa didik sebagai kelinci percobaan dalam mencari kebijakan yang sesuai dengan rezim pemerintahan.

Untuk itu, sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa, pemerintah harus membuat suatu kajian yang mendalam agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan utama dari penyelenggaraan evaluasi tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan baik dari satuan pendidikan, siswa, maupun orang tua dalam menghadapi sistem evaluasi yang selalu dilaksanakan setiap tahun.

Terkait masih adanya kebocoran-kebocoran dana UN dan USBN, pemerintah harus memperketat pengawasan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan dan melakukan penindakan tegas terhadap oknum guru atau sekolah yang melakukan pelanggaran. Dalam hal perekrutan guru yang terlibat dalam MGMP, guru tersebut harus memiliki persyaratan dan kompetensi khusus yang telah teruji. Khusus untuk penanganan permasalahan teknis, khususnya UNBK, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan listrik dan internet ke seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan proktor di setiap sekolah juga harus lebih optimal dengan merekrut proktor yang memiliki keahlian di bidangnya dan memberikan pelatihan pengenalan aplikasi UN beserta permasalahannya.

Penutup

Evaluasi akhir pembelajaran siswa mulai tahun 2016 dilakukan melalui UN dan USBN. Hadirnya USBN bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil evaluasi akhir siswa. Pada tahun 2017, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan UN dan USBN mulai dari pelanggaran POS, lemahnya pengawasan, suasana ujian yang tidak kondusif, kebocoran jawaban soal sampai adanya temuan kasus upaya bunuh diri siswa. Selain itu juga terdapat permasalahan teknis dan nonteknis yang menghambat kelancaran proses ujian.

Bebagai permasalahan dalam pelaksanaan UN dan USBN harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Kebijakan evaluasi akhir pembelajaran siswa yang terus berubah setiap tahun cenderung menjadikan siswa didik sebagai objek percobaan dari perubahan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan, agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dari

evaluasi pendidikan. Sementara DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa. Dengan demikian ke depan pelaksanaan evaluasi akhir pembelajaran siswa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi

- “Gelar Rakor, Kemendikbud Sampaikan Pokok Kebijakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2017”, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/gelar-rakor-kemendikbud-sampaikan-pokok-kebijakan-ujian-nasional-dan-ujian-sekolah-tahun-2017>, diakses 18 April 2017.
- “Kasus Bunuh Diri Siswa Terkait Ujian, USBN Diminta Ditinjau Ulang”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39589093>, diakses tanggal 19 April 2017.
- “Ombudsman Temukan 10 Kecurangan Dalam Ujian Nasional”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/901540-ombudsman-temukan-10-kecurangan-dalam-ujian-nasional>, diakses 19 April 2017.
- “Ombudsman Temukan Maladministrasi pada USBN 2017”, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/423282-ombudsman-temukan-maladministrasi-pada-usbn-2017.html>, diakses 19 April 2017.
- “Pers Release FSGI Terkait UNBK SMK 2017”, http://www.fsgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27:pers-release-fsgi-terkait-unbk-smk-2017&catid=12&Itemid=124, diakses 19 April 2017.
- “Selamat Datang UNBK dan USBN”, http://krjogja.com/web/news/read/27915/Selamat_Datang_UNBK_dan_USBN, diakses 19 April 2017.
- “UNBK SMK, 7 Kendala Ini Mesti jadi Perhatian Pemerintah”, <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/06/058863217/unbk-smk-7-kendala-ini-mesti-jadi-perhatian-pemerintah>, diakses 19 April 2017.